

**ANALISIS KONSEP AMANAH DALAM AKUNTABILITAS  
PADA PENGELOLAAN DANA DESA MENUJU GOOD VILLAGE  
GOVERNANCE  
( Studi Pada Desa Karya Mukti, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten  
Batang Hari )**

**Anggi Apriani Br Sinaga<sup>1</sup>, Youdhi Prayogo<sup>2</sup>, Nurrahman Sari Putri<sup>3</sup>**  
[anggisinaga280@gmail.com](mailto:anggisinaga280@gmail.com)<sup>1</sup>, [youdhiprayogo@uinjambi.ac.id](mailto:youdhiprayogo@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nurrahmah.sputri@uinjambi.ac.id](mailto:nurrahmah.sputri@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**

**ABSTRAK**

Dana Desa merupakan Dana yang sangat besar dan diatur oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi di wilayahnya. Maka ada potensi penyalahgunaan Dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan pertanggungjawaban, namun juga mencakup aspek seberapa mudah pelanggan menerima informasi, baik langsung maupun tidak langsung, lisan maupun tertulis, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh dalam lingkungan yang mengutamakan transparansi. tanggung jawab Sistem dan prosedur pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana pendekatan yang digunakan adalah Dekriptif. Dalam penelitian kualitatif, posisi sumber datanya adalah manusia (Narasumber) memegang peranan yang sangat penting sebagai seorang individu informasi. Pengelolaan Dana Desa secara transparansi tentunya sangat diharapkan agar terlaksana dengan baik, untuk mencapai terselenggaranya dengan baik. Bentuk partisipasi aktif masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan perencanaan pembangunan yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pemerintah desa telah memenuhi tanggung jawabnya dengan tegas menerapkan prinsip akuntabilitas. Transparansi dalam hal ini yang dilakukan oleh pegawai kantor desa yaitu pemberian informasi keuangan desa pada papan informasi di kantor desa bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat desa mengenai pendapatan dan pengeluaran desa. Hal ini terdiri dari dua bagian: laporan pertanggungjawaban dan realisasi. Pemerintah Desa Karya Mukti menjalankan tanggung jawabnya baik secara vertikal maupun horizontal, hal ini sejalan dengan konsep amanah yang menekankan tanggung jawab tidak hanya kepada masyarakatnya saja, tetapi juga kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT dan merupakan tanda desa yang baik. Terwujudnya Good Village Governance Di Desa Karya Mukti hal ini mencakup akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

**Kata Kunci:** Amanah, Pengelolaan Dana Desa, Good Village Governance.

**ABSTRACT**

*The Village Fund is a very large fund regulated by the government, which aims to empower village communities in managing and developing potential in their area. So there is the potential for misuse of funds by irresponsible parties. Accountability is not only limited to responsibility reports, but also includes aspects of how easily customers receive information, both directly and indirectly, verbally and in writing, so that accountability can grow in an environment that prioritizes transparency. responsibilities Village fund management systems and procedures. The research method used in this research is qualitative research where the approach used is descriptive. In qualitative research, the position of the data source is humans (resources) who play a very important role as individual information. It is certainly hoped that transparent Village Fund management will be carried out well, to achieve good implementation. This form of active community participation can be realized through development planning activities under the Village Development Planning Agency (Musrenbangdes). The village government has fulfilled its*

responsibilities by firmly implementing the principle of accountability. Transparency in this case is carried out by village office employees, namely providing village financial information on the information board at the village office with the aim of informing the village community about village income and expenditure. This consists of two parts: accountability report and realization. The Karya Mukti Village Government carries out its responsibilities both vertically and horizontally, this is in line with the concept of mandate which emphasizes responsibility not only to the community, but also to the Creator, namely Allah SWT, and is a sign of a good village. The realization of Good Village Governance in Karya Mukti Village includes accountability, transparency and participation.

**Keywords:** Trust, Village Fund Management, Good Village Governance.

## PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan Dana yang sangat besar dan diatur oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi di wilayahnya. Maka ada potensi penyalahgunaan Dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya mekanisme pemantauan yang memadai, dan tanpa sistem pengawasan yang efektif dalam pengelolaan Dana Desa, korupsi dan penyelewengan dapat terjadi dalam penggunaan Dana tersebut. Meskipun ada desa yang mampu memanfaatkan Dana Desa dengan baik, ada pula desa yang masih memiliki kekurangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana.

Di tengah krisis ekonomi yang sering terjadi, Pemerintah berupaya mencegah korupsi demi menjaga pemerintahan nasional yang bersih dan bermartabat. Untuk mewujudkan komitmen ini diperlukan sistem pemerintahan yang baik dan efektif serta sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Konsep pemerintahan yang baik disebut dengan good governance.

Pada akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan pertanggungjawaban, namun juga mencakup aspek seberapa mudah pelanggan menerima informasi, baik langsung maupun tidak langsung, lisan maupun tertulis, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh dalam lingkungan yang mengutamakan transparansi. tanggung jawab Sistem dan prosedur pengelolaan dana desa . Namun Masih banyak kelemahan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa adalah kesiapan para pengelola dana desa untuk mempertanggungjawabkan apa yang diberikan kepadanya secara efektif, efisien, adil dan transparan menurut masyarakat. Sehingga penggunaan dana desa diperhatikan baik secara vertikal maupun horizontal.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Penerimaan uang ke rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Menurut Pasal 29 PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan .

Tabel 1. Pendapatan Dana Desa

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Dana Desa
1	2021	Rp 921.346.663
2	2022	Rp 836.904.227
3	2023	Rp 875.507.709

Sumber : Sid.Kemendesa.go.id

Pada tahun 2021 telah dibangun kandang sapi untuk diperolehnya pupuk kompos dari kotoran sapi, bekerja sama dengan para peternak sapi. Namun, terdapat beberapa peternak sapi yang sungkan menitipkan sapinya untuk diperoleh pupuk kompos karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang manfaat kompos dalam budidaya

sapi. Ditambah terdapat konflik BUMDes yang mengurus perihal pembangunannya sehingga saat kandang sapi sudah siap dibangun, kegiatan yang diharapkan tidak berjalan.

Desa berperan sangat penting dalam penyelenggaraan urusan desa secara umum dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terencana dan lancar, khususnya dalam program-program urusan desa yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa. Masyarakat desa akan menjadi layak dan kehidupan yang kaya akan dimungkinkan.

Untuk memahami pentingnya desa sebagai wajah Indonesia dan pentingnya perubahan pengelolaan dan tata kelola desa hingga membentuk konsep paradigma pabrik jasa yang baru, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk membangun dan meningkatkan kapasitas desa. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemerintahan desa merupakan kunci modernisasi pemerintahan desa. Dengan cara ini, tujuan pemerintah dan masyarakat dapat tercapai secara bersamaan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung melalui Organisasi-organisasi yang mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat sangatlah penting, partisipasi ini dimulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Dana desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa dalam rangka pembangunan disetiap desa penerima hibah. Dalam pengelolaan Dana Desa harus bertanggung jawab dan transparan sehingga dapat tercipta sistem pengelolaan yang baik dan good village governance dapat tercapai.

Jumlah penduduk di Desa Karya Mukti pada Tahun 2023 terdiri dari 1.418 jiwa yang terdiri atas laki – laki 735 jiwa dan perempuan 683 jiwa.

Tabel 2 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
1	735 Jiwa	683 Jiwa	1.418 Jiwa

Sumber : Profil Desa Karya Mukti 2023

Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik menjadi pendorong percepatan penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat seringkali kurang percaya terhadap pemerintah yang mengontrol dana desa. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya desa. Sebab, masyarakat merasa kontribusinya tidak dihargai atau diperhitungkan oleh pemerintah.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Pengelolaan Dana Desa. Banyak masyarakat di pedesaan yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, mereka tidak mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa.

Sejujurnya seperti halnya pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara jujur agar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat terlaksana. Salah satu konsep yang dapat menjadi solusi dalam pengelolaan dana desa adalah konsep amanah dengan pendekatan Syariah Enterprise Theory. Konsep amanah mengandung makna kepercayaan dan pertanggungjawaban secara vertical dan horizontal. Sedangkan Akuntabilitas mengandung setiap tindakan atau kinerja suatu pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berhak atau berwenang meminta informasi pertanggungjawaban.

Pengaplikasian konsep amanah dalam akuntabilitas pada pengelolaan dana desa

diharapkan dapat meningkatkan transparansi, integritas, serta efektivitas penggunaan dana desa. Dengan demikian implementasi konsep amanah dalam akuntabilitas dapat membantu menuju pada tata kelola desa yang baik (Good Village Governance).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Konsep Amanah Dalam Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance ( Studi Pada Desa Karya Mukti, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari)”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dinilai oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara komprehensif dan deskriptif, kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam tertentu, dan menggunakan berbagai cara alami .

Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang terjadi atau sedang terjadi. Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang terjadi saat ini dan mengetahui hubungan antar variabel yang ada. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini dipilih karena dilakukan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Konsep Amanah dalam Pengelolaan Dana Desa Karya Mukti**

Pengelolaan Dana Desa secara transparansi tentunya sangat diharapkan agar terlaksana dengan baik, untuk mencapai terselenggaranya dengan baik , Jadi harus ada pemahaman konsep amanah dalam diri masing-masing pemerintah Desa sehubungan dengan penyelenggaraan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa Karya Mukti :

“Dana Desa Tahun 2023 keseluruhannya sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan secara terbuka, terkait dengan kekurangan namanya suatu kegiatan pasti ada kekurangan. Selain itu, pemasangan papan informasi berupa spanduk penggunaan Dana Desa secara umum sudah kita terapkan.”

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dikatakan oleh Ketua Rt 06 dan masyarakat Desa Karya Mukti:

“Sudah sesuai dengan transparansi yang diharapkan, karena semua Dana Desa terpampang dengan jelas di kantor desa. dengan adanya laporan-laporan seperti laporan pertanggung-jawaban, juga rangkaian APBDesa tertera pada Baliho”.

Accountability to hubinas (tanggung jawab terhadap sesama manusia/rekan sejawat). Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan karena itu merupakan makhluk yang kompleks Ada pertanggung jawaban kepada Allah SWT, lalu atas apa yang diperbuatnya semasa hidupnya di muka bumi ini juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasannya hari terakhir.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh Kepala Desa:

“Insyallah dalam penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan amanah, dan insyaallah bisa di pertanggung jawabkan selain kepada kita manusia tapi juga kepada tuhan, namun lagi-lagi yang namanya kekurangan pasti ada”.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara yang di katakana Kepala Dusun 05 :

“Menurut saya penggunaan Dana Desa sudah amanah dengan apa yang dilakukan

pemerintah desa, yang insya allah tidak ada penyimpangan pada penggunaan Dana Desa”.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa Pemerintah desa Desa Karya Mukti menjalankan tanggung jawabnya baik secara vertikal maupun horizontal, hal ini sesuai dengan konsep amanah yang menekankan tanggung jawab tidak hanya kepada masyarakatnya saja tetapi juga kepada pencipta kita yakni Allah SWT. Tanpa penyimpangan apa pun untuk melayani masyarakat, sehingga menjamin akuntabilitas.

Jika memahami konsep ini dalam konteks amanah, maka akan memahami bahwa segala aktivitas adalah untuk keridhaan Allah SWT. Inilah bentuk pencapaian tertinggi, lebih tinggi dari materialisme. Reputasi yang dapat diandalkan dan profesionalisme merupakan modal terpenting bagi lembaga desa untuk menjalankan misinya dengan sebaik-baiknya.

### **Pengelolaan Dana Desa Desa karya Mukti**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa akan kesulitan mendapatkan pendanaan baik dari APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan keuangan. Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan desa akan sangat membantu kepala desa dan perangkat desa lainnya dalam memikul tanggung jawab keuangan desa.

Pertama, Perencanaan Dana Desa merupakan kegiatan merencanakan pembangunan desa. Rencana DD harus dilaksanakan agar dana dapat digunakan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, dan lebih tepat sasaran. Hasil anggaran dan rencana kerja yang telah disetujui oleh peraturan desa ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam waktu satu tahun. Rencana DD di Desa Karya Mukti memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berarti memberikan informasi tentang program yang sedang berjalan melalui pertemuan dan papan buletin agar seluruh masyarakat mendapat informasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh Kepala Desa:

“harus melalui musyawarah mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Untuk menentukan itu biasanya dari kadus per kadus apa yang dibutuhkan baru diadakan musrengbangdes, mana yang paling banyak dan yang dibutuhkan”

Kedua, Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD dilakukan oleh pejabat yang berwenang, pejabat pemerintah, bahkan masyarakat. Pemantauan akan berupa pemantauan dan evaluasi observasi langsung di setiap desa. Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah pembangunan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Masyarakat Desa :

“Akuntabilitas pelaksanaan dengan BPD monitoring seluruh kegiatan hingga akhir tersusunnya laporan akhir/laporan pertanggungjawaban”.

Ketiga, Dalam hal pertanggungjawaban ADD, kepala desa berperan sebagai ketua tim pelaksana dan bertanggung jawab atas pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa di Desa Karya Mukti dicatat secara sistematis mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan dibuktikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan berkala dan laporan akhir.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa Desa karya mukti telah berhasil melaksanakan APBDesa dengan akuntabilitas dan pengawasan yang baik oleh BPD.

### **Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Village Governance**

Konsep good governance di Indonesia secara umum diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan otoriter. Pemanfaatan sumber daya desa secara optimal dan penciptaan

lapangan kerja memerlukan peran aktif masyarakat dalam menentukan bentuk-bentuk pemberdayaan yang diperlukan, sesuai dengan potensi desa setempat. Bentuk partisipasi aktif masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan perencanaan pembangunan yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Konsultasi diselenggarakan untuk menentukan prioritas pembangunan desa, program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan dari APB desa, swadaya masyarakat, dan/atau APBD kabupaten/kota berdasarkan kajian kebutuhan masyarakat. Hasilnya akan menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah desa dan instansi lainnya dalam menjalankan tugasnya. Dan juga membangun hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan Kasi Kesejahteraan:

“Dengan adanya musrenbangdes, terlihat hubungan yang terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat baik. Dan tentunya sudah sangat sinkron, tadinya masyarakat yang tidak mau bertanya tapi didalam musyawarah perkadus masyarakat jadi ada yang bertanya. Namun masih harus ditingkatkan lagi supaya lebih sinkron”.

Hal ini dikuatkan lagi dengan hasil wawancara yang di utarakan ketua Rt 06:

Dana desa yang turun itu digunakan untuk masyarakat desa karya mukti, tidak ada untuk dana yang bukan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat. Dan keputusan diambil secara musyawarah”.

Namun dibalik kelancaran suatu kegiatan terdapat kendala sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan dalam wawancara:

“Untuk pembangunan, anggaran yang dibuat pada APBDesa tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang harga lebih mahal dan tidak sesuai dengan APBdesa. Maka harus survei terlebih dahulu. Dan kendala khusus dengan masyarakat itu kurang kesadaran seperti gotong royong. Yang mana perlu adanya upah”.

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa pemerintah dan masyarakat setempat bekerja sama dalam mengembangkan sarana dan prasarana desa, namun diakui masih ada sebagian warga yang kurang berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa melalui musrenbangdes telah mempererat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga terjadi sinkronisasi pengambilan keputusan untuk kesejahteraan desa.

Namun secara umum pemangku kepentingan sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat sangat membantu dalam pengelolaan sumber daya desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Stakeholdernya antara lain BPD, Kadus, RT, dan tokoh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah desa telah memenuhi tanggung jawabnya dengan tegas menerapkan prinsip akuntabilitas. Jika pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dan perangkat desa lainnya dalam proses pelaksanaan APBDes, maka prinsip transparansi terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan APBDes Desa Karya Mukti akan diterapkan pada tahap pengelolaan dana desa Desa Karya Mukti. Transparansi dalam hal ini yang dilakukan oleh pegawai kantor desa yaitu pemberian informasi keuangan desa pada papan informasi di kantor desa bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat desa mengenai pendapatan dan pengeluaran desa. Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah Desa Karya Mukti berupa evaluasi dan transparansi. Hal ini terdiri dari dua bagian: laporan pertanggungjawaban dan realisasi.

Pemerintah Desa Karya Mukti menjalankan tanggung jawabnya baik secara vertikal maupun horizontal, vertikal tanpa penyimpangan apa pun untuk melayani masyarakat, sehingga menjamin akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan konsep amanah yang

menekankan tanggung jawab tidak hanya kepada masyarakatnya saja, tetapi juga kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT dan merupakan tanda desa yang baik. Terwujudnya Good Village Governance Di Desa Karya Mukti hal ini mencakup akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

### **Saran**

Adapun saran yang disampaikan untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa agar dapat memaksimalkan kinerjanya terkait dengan hasil penelitian yang diuraikan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan : Meningkatkan kinerja sistem transparansi melalui penyediaan informasi yang komprehensif, tidak hanya dalam bentuk signage, namun juga pada website desa yang tersedia untuk umum.
2. Kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Jurnal Artikel**

- Ariani, Ida, Lince Bulutoding, and Namla Elfa Syariati. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 3, no. 1 (June 30, 2022): 65–81.
- As'ad, Abdul Latif. "Prinsip Amanah Sebagai Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Luwu Utara" (n.d.).
- Dahlia, Nelly. "Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaboration Governance Pada Pelayanan Publik." *Journal of Governance Innovation* 5, no. 1 (March 28, 2023): 61–79.
- Department of Governmental Science, Universitas Warmadewa, Bayu Adhinata, I Ketut Darma, Department of Economics Development, Universitas Warmadewa, Ni Wayan Sirimiati, and Department of Management, Universitas Warmadewa. "Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government." *SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora* 10, no. 3 (November 28, 2020): 334–344.
- Dr. Drs. H. Mansyur Achmad KM., M.Si. "Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulator San Aplikatif." Jakarta: 2018, 2021.
- Dr.Drs. I Wayan Suwendra, S.Pd., M.Pd. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan." Bandung, 2018.
- Fahreza, Muhamad Bagus, Wawan Sadtyo Nugroho, and Anissa Hakim Purwantini. "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo)" (n.d.).
- Fajarini, Suci. "Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam April 2020" (n.d.).
- Farida, Vilmia, Ahmad Waluya Jati, and Riska Harventy. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (November 5, 2018). Accessed July 7, 2023. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/6939>.
- Fredrik cantona, Youdhi Prayogo,S.E., M.E.I. Muthmainnah, S.E., M.S.Ak. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas SDM terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (January 2024).
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (March 20, 2020): 19–27.
- Helaluddin & Hengki Wijaya. "Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik." Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

- Irmayanti, Irmayanti, Syamsuri Rahim, and Sumarni Sumarni. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (April 12, 2023): 53–62.
- Iza, Ika Nurul, Muhammad Mujtaba Habibi, and Didik Sukriono. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang" 7 (2022).
- Kalbarini, Rahmah Yulisa. "Implementasi Akuntabilitas dalam Shari'ah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)." *Al-Tijary* 4, no. 1 (December 31, 2018): 1–12.
- Karim, Rusdi Abdul, and Mursalim Mursalim. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan." *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (February 3, 2019): 39–49.
- Kehik, Bernardus Seran, and Medan Yonathan Mael. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot." *AGRIMOR* 2, no. 04 (October 20, 2017): 59–62.
- Kurniawan, Dodi. "Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Usaha Mikro Kecil Menengah Di Candi Muaro Jambi" (n.d.).
- Majid, Jamaluddin, Serlianti Serlianti, Mahdalena Mahdalena, and Mustakim Muchlis. "Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 2, no. 1 (June 30, 2022): 33–46.
- Moh Syamsul Rijal, Lilik HandajaniDwi Putra Buana Sakti. "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance" 31 No.12 (Desember 2021).
- Muhammad Mu'iz raharjo, S.STP., M.Si. *Pengelolaan Dana Desa*. November 2020, n.d.
- Ningsih, Wahyu, Fefri Indra Arza, and Vita Fitria Sari. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 4 (December 9, 2020): 3517–3532.
- Nugroho, Alfian Prasetya, and Ida Kristiana. "Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Good Governance dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang)" (n.d.).
- Nurkholis & Moh. Khusaini. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang, 65145 Indonesia, 2019.
- Rustiarini, Ni Wayan. "Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa" (n.d.).
- Saifuddin, UIN Sulthan Thaha. "Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo)" 4 (2019).
- Sarah, Siti, Taufeni Taufik, and Devi Safitri. "The Effect Of Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization Of Information Technology, Community Participation And Internal Control System Of The Accountability Of Village Management In Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 4 (2020).
- Suwandi, Memen, Namla Elfa Syariati, and Puspita Hardianti Anwar. "Vol. VII No.2 Desember 2021 Page 237-259 [jiap@uin-alauddin.ac.id](mailto:jiap@uin-alauddin.ac.id)," no. 2 (2021).
- Tambuwun, Fernando Victory, Harijanto Sabijono, and Stanly W. Alexander. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (December 31, 2018). Accessed July 7, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20904>.
- Buku**
- Dr.Drs. I Wayan Suwendra, S.Pd., M.Pd. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan." Bandung, 2018.
- Dr. Drs. H. Mansyur Achmad KM., M.Si. "Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif San Aplikatif." jakarta: 2018, 2021.
- Helaluddin & Hengki Wijaya. "Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik." Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Muhammad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si. "Tata Kelola Pemerintah Desa." Jakarta Timur Juni 2021.

Nurkholis & Moh. Khusaini. Penganggaran Sektor Publik. Malang, 65145 Indonesia, 2019.

**Skripsi**

Suwandi, Memen, Namla Elfa Syariati, and Puspita Hardianti Anwar. "Konsep Amanah: Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Villagegovernance Vol. VII No.2 Desember 2021 Page 237-259 [jiap@uin-alauddin.ac.id](mailto:jiap@uin-alauddin.ac.id)," no. 2 (2021).

Fajarini, Suci. "Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam April 2020" (n.d.).

**Website**

Kemendesdesa, "Data pendapatan Dana Desa"<https://sid.kemendesdesa.go.id>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia,"Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2023,"Pemerintah Pusat,27 Oktober 2022, LN.2022/No.208, TLN No.6827, [jdih.detneg.go.id](http://jdih.detneg.go.id):54 hlm.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa", Jakarta-22-September-2023,